

Komnas HAM akan Buat Kajian soal Larangan Nikah Beda Agama

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membuat kajian terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi petunjuk untuk hakim agar tidak mengabaikan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Komisiner Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, isu terkait nikah beda agama itu sudah dibicarakan di dalam internal Komnas HAM untuk dilakukan pengkajian secara cepat.

"Kemarin sudah dibicarakan bahwa Komnas HAM akan membuat kajian cepat terkait isu (larangan hakim mengabaikan permohonan pencatatan pernikahan beda agama) ini," ujar Pramono saat dihubungi wartawan, Jumat (21/7).

Setelah ada kajian Komnas HAM akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait soal isu pernikahan beda agama tersebut. Namun, untuk saat ini Komnas HAM belum bisa memberikan pernyataan apapun terkait larangan pernikahan beda agama.

Mahkamah Agung sebelumnya mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Dalam SEMA tersebut, hakim dilarang untuk mengabaikan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

"Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan," demikian bunyi SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Senin (17/7).

Dalam SEMA ini juga disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Pengadilan tidak mengabaikan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan," tulis poin 2 SEMA tersebut.

Juru Bicara MA Suharto mengatakan, aturan itu dibuat untuk memberikan kepastian penerapan hukum terkait perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Mulanya, Luhut membantah bahwa dirinya menyalahgunakan kekuasaan sebagai ketua umum Partai Golkar. Hal ini ditegaskan Luhut saat dikonfirmasi mengenai

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RILIS KINERJA KEJATI SUMSEL PERIODE JANUARI-JUNI 2023

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan Sarjono Turin (tengah) didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Agoes Soenan P (kanan) dan Asisten Bidang Intelijen N Rahmat (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat rilis pencapaian kinerja di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Jumat (21/7). Dalam kesempatan tersebut Kajati Sumsel refleksi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan periode Januari-Juni 2023.

Luhut: Kalau Saya Ketum Golkar, 86 Kursi di Parlemen Pasti Dapat

Luhut Panjaitan meminta Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, bersikap realistis dan tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden.

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, optimis akan meraih 86 kursi di DPR jika dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar.

Hal ini ditegaskan Luhut saat dikonfirmasi mengenai

umum. Namun kemudian menyatakan bakal memperbaiki kondisi Golkar.

"Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau memperbaiki saja karena saya suka memperbaiki dan saya yakin itu bisa, 86 kursi pasti dapat," ujar Luhut di acara talkshow Rosi, yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (20/7).

Hasil Pemilu 2019 lalu, Golkar berada di urutan kedua dengan perolehan 85 kursi di DPR

atau 1 mendulang 17.229.789 (12,31 persen) suara.

Luhut meminta Airlangga bersikap realistis dan tidak ngotot menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurutnya, alih-alih menjadi partai yang seakan "menjual diri" ke sana kemari demi mendapatkan jatah calon wakil presiden. Golkar lebih tepat mengamankan kursi di parlemen.

"Kita harus bisa bikin, at least mempertahankan 85 suara sekarang, kalau bisa di atas 100," ujar Luhut.

Luhut juga mengaku didorong sejumlah kader Golkar untuk maju sebagai ketua umum menggantikan Airlangga. Ia pun mengaku membebaskan keputusan kader Golkar yang tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga. Namun, kata Luhut, jika diselenggarakan Munaslub dan dicalonkan sebagai ketua umum, ia tidak akan menggunakan uang.

"Kalaupun nanti ini kalian bikin saya enggak mau main uang karena biar Golkar ini kembali pada masa lalunya, jangan main uang-ang dan biar partai itu juga lebih baik lagi kedepan," tutur Luhut.

Sebelumnya, Partai Golkar tengah dilanda isu perpecahan. Sejumlah elite disebut mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), mencopot Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum.

Sementara itu, sejumlah pihak di internal Golkar tetap ngotot mengusung Airlangga baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden meski elektabilitasnya rendah.

"Insya Allah kami optimis bahwa kami masih tetap, sampai hari ini, kami mencalonkan ketum kami Pak Airlangga Hartarto, baik sebagai capres maupun cawapres," ujar Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar MQ Iswara, Jumat (19/5). ● han

KPK Beberkan Perputaran Uang Korupsi Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan perputaran uang korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Uang tersebut kemudian ditampung di rekening orang kepercayaan salah satu pegawai Kementerian ESDM, Priyo Andi Gularso (PAG).

Soal perputaran uang tukin Kementerian ESDM tersebut kemudian dikonfirmasi ke salah satu saksi yang merupakan Wiraswasta, Budi Hartono, pada Kamis (20/7). Budi diduga mengetahui soal adanya dugaan perputaran uang tukin pegawai Kementerian ESDM.

"Budi Hartono (wiraswasta), saksi hadir dan didalam pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran perputaran uang Tukin yang kemudian ditampung dalam rekening bank orang kepercayaan dari tersangka PAG dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkatnya, Jumat (21/7).

Terkait dugaan korupsi Tukin di Kementerian ESDM, telah menetapkan 10 pegawai Kementerian ESDM sebagai tersangka korupsi pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin). Para tersangka diduga bersekongkol jahat mengele-

mark up menjadi sebesar Rp29.003.205.373. Atas pengelembungan dana tersebut, terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720

Dari selisih itu, para tersangka mendapat keuntungan yang berbeda-beda, dengan rincian: Priyo Andi Gularso Rp4,75 miliar, Novian Hari Subagio Rp1 miliar, Lernhard Febian Sirait Rp10,8 miliar, Christa Handayani Pangaribowo Rp2,5 miliar, Abdullah Rp350 juta, Haryat Prasetyo Rp1,4 miliar, Beni Arianto Rp4,1 miliar, Hendi Rp1,4 miliar, Rokhmat Annashikhah Rp1,6 miliar, dan Maria Febr Valentine Rp900 juta.

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, uang haram yang dikantongi para tersangka tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, untuk menyuap Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejumlah sekitar Rp1,035 miliar.

Kemudian, digunakan dalam rangka dana taktis untuk operasional kegiatan kantor. Selanjutnya, digunakan untuk keperluan pribadi di antaranya, kerja sama umroh, sambutan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, hingga logam mulia. ● han

Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral Kementerian ESDM tersebut diduga telah memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.

Di mana, dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya hanya dibayarkan Rp1.399.928.153, kemudian digelembungkan atau di-



PEMERIKSAAN HARNO TRIMADI

Tersangka kasus suap Harno Trimadi (kanan) berangkat keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/7). Mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) itu diperiksa terkait kasus dugaan suap pengaturan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra agar dimenangkan oleh PT KAPM yang dilakukan secara bertahap.

PKB Ingin Peringatan Harlah di Solo Satukan Kekuatan untuk Pilpres 2024

JAKARTA (IM) - Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/7), disebut akan menjadi momentum konsolidasi jelang Pemilu 2024.

"Kami akan menjadikan momentum syukuran Harlah yang dihadiri semua simpul PKB baik di jajaran syuro, tanfidziah, hingga kader di akar rumput untuk menyatukan tekad bekerja lebih keras untuk sukses PKB baik di Pilpres maupun Pileg," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Hasanudin Wahid melalui keterangan resmi, Jumat (21/7).

Hasan menjelaskan bahwa PKB masih bertekad mengantarkan Muhaimin Iskandar, ketua umum mereka, ke kursi presiden. Di ajang pemilihan legislatif (pileg), PKB mengincar 100 kursi di DPR RI, 500 kursi di DPRD Provinsi, dan 3.000 kursi di DPRD Kabupaten/Kota.

"Kejelasan target ini

telah diikuti dengan implementasi kerja strategis dan taktis yang saat ini jika dipresentasikan telah mencapai 60 persen," katanya.

"Maka sisa 40 persen akan kita genjot habis dengan penyatuan tekad dan kekuatan di momentum perayaan Harlah di Solo," sebut Hasan.

Hasan optimistis kedua terget itu bisa dicapai. Ia mengungkit elektabilitas PKB dalam berbagai jajak pendapat dari berbagai lembaga survei yang dianggap stabil. Ia juga mengklaim deklarasi dukungan untuk Muhaimin terus bermunculan.

"Indikator positif ini perlu kita jaga salah satunya dengan terus memajukan mesin partai. Jadi kalau kemarin jalannya masih gigi empat, maka pasca syukuran Harlah nanti bisa ngegas jadi gigi lima," katanya.

Meski demikian, Hasan mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan PKB, seperti kelengkapan syarat pengajuan Muhaimin jadi presiden, kesolidan simpul-simpul struktur, relawan, hingga simpatisan, dan sosialisasi program unggulan Muhaimin.

"Agenda-agenda tersebut menjadi pekerjaan rumah. Semoga setelah Harlah termasuk adanya kehadiran Presiden Jokowi menjadi bahan bakar bagi warga PKB untuk menuntaskannya," ujarnya. ● mei

PENGUMUMAN

Hilang IMB 7683/IMB/2013 tanggal 17 Juli 2013, a/n Ny. Hj. Raden Roro Sri Roosbyaklita. Jl. Wijaya II No.122 RT 005/RW 003 Kel.Melawar Kec.Keบายoran Baru. Jaksel



BIMTEK PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (kanan) didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Uwes Qoroni (kiri) berbincang usai Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (21/7). Bimtek bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif desa tersebut untuk memahami konsep pengembangan yang memperhatikan keseimbangan antara sektor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan.

Dito Mahendra Tersangka Senpi Ilegal Diyakini Masih Berada di Indonesia

JAKARTA (IM) - Tersangka kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra, belum juga berhasil ditangkap. Namun pihak Kepolisian yakin bahwa Dito masih ada di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rhardjo Puro meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir soal kasus Dito Mahendra, tersangka kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal. Polisi pasti akan menangkap kekasih Nindy Ayunda tersebut.

"Percayakan kepada kami, kemana pun lari akan kami kejar. Kami dilatih untuk mencari dan mengejar tersangka pidana yang melarikan diri," kata Djuhandhani, Jumat (21/7).

Djuhandhani, yakin bahwa Dito Mahendra masih be-

rada di Indonesia. Sebab, polisi sudah menyita paspornya.

"Paspornya kami sita dan sudah dicekal. Dari data perlintasan juga tidak ada catatan dia (Dito Mahendra) melintas. Artinya masih ada di Indonesia," jelasnya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Dito Mahendra dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 4 Mei 2023. Sebelumnya, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senpi ilegal.

Menyinggung soal isu yang menyebutkan Dito memiliki bekingan sehingga sulit ditangkap, Djuhandhani menegaskan pihaknya tidak menghadapi kendala atau rintangan dalam menangkap seteru Nikita Mirzani tersebut.

"Tidak ada kendala sampai saat ini. Hanya proses waktu saja," katanya. ● mar

Pasukan Kostrad dan Brimob Kerahkan Kendaraan Tempur ke Markas KKB di Nduga

NDUGA (IM) - Satgas Pamtas Mobile Yonif MR 411/Pandawa Kostrad bersama jajaran Polres Nduga dan Satgas Aman Nusa, melakukan patroli Kenyam, melakukan patroli Kenyam, melakukan patroli Kenyam di wilayah Kota Kenyam, Kampung Mumugu hingga Pelabuhan Amur.

Dansatgas Mobile Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa Kostrad, Letkol Inf Subandi, mengatakan, Patroli gabungan idigelar untuk memastikan dan melihat langsung wilayah keamanan, khususnya di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga yang beberapa waktu terjadi baku tembak dengan KKB.

"Semua ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," ujar Subandi, Jumat (21/7).

Patroli gabungan TNI-Polri dipimpin Letkol Subandi

dan Kapolres Nduga, Kompol Vinsensius Parapaga.

Dengan kendaraan tempur lapis baja kemudian tim bergerak dari Kota Kenyam melintasi daerah rawan gangguan KKB hingga menuju ke Kampung Mumugu (Batas Batu) dan Pelabuhan Amur.

Dia berharap, dengan dilaksanakan patroli gabungan ini semoga sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan khususnya di wilayah Kabupaten Nduga semakin solid dan kuat. "TNI-Polri akan selalu bersinergi dan solid untuk bersama-sama menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat Kenyam dan sekitarnya," ujarnya.

"Tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut juga diperlukan sinergitas. Untuk itu mari bersama-sama menjaga tanah Papua yang damai dan aman bagi semua," ujarnya. ● mei